

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Ubah Master Plan Penanganan Banjir

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, Pj Gubernur Heru Budi Hartono maupun Gubernur DKI definitif berikutnya harus merevisi master plan atau rencana induk penanganan banjir. Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih memakai master plan yang disusun pada tahun 1973 lalu.

"Kementerian PUPR itu sudah menyampaikan usulan untuk meningkatkan kapasitas sistem pengendalian banjir di Jakarta, karena sampai sekarang masih menggunakan sistem master plan tahun 1973, padahal yang sekarang ini harusnya sistem untuk (menangani) hujan yang mungkin sampai skala 1.000 tahun," kata Yayat, Jumat (14/10/2022).

Menurutnya, upaya yang dapat menekan potensi banjir adalah normalisasi dan pelebaran sungai ataupun kali.

Jika hal ini tidak dikerjakan, Jakarta akan terus dilanda banjir apalagi jika terjadi hujan ekstrem di atas 255 milimeter per hari.

"Jawabannya adalah dengan cara mengubah master plan yang lama dengan yang baru, harusnya itu dilakukan. Sudah saatnya beberapa sungai, kemudian Kanal Banjir Barat (KBB), Kanal Banjir Timur (KBT), sodetan Sungai Ciliwung dan sebagainya, itu harus ditingkatkan supaya bisa mengantisipasi hujan ekstrem," jelas Yayat.

Dalam kesempatan itu, Yayat ragu Pj Gubernur dapat mengeksekusi proyek normalisasi sungai maupun kali. Soalnya Pj Gubernur harus mengubah master plan yang diusulkan Kementerian PUPR terlebih dahulu dan memasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.

"Siapa pun gubernurnya yang akan datang harus berani membuat revisi atau perbaikan master plan penanggulangan banjir Jakarta yang mengubah tahun 1973 dengan apa yang diusulkan, itu merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan. Tanpa itu Jakarta tetap akan menghadapi masalah yang sama," ungkapnya.

Meski demikian, Yayat tetap mengapresiasi lima tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta untuk kebijakan yang lain, seperti penataan trotoar dan pengintegrasian transportasi publik. Yayat merasakan hal itu karena dia merupakan pejalan kaki dan kerap menggunakan transportasi umum.

"Saya merasa itu sangat nguwongke (mengorbankan) orang, karena dengan tarif Rp 10.000 itu membantu di tengah kesulitan bahan bakar yang seperti sekarang (mahal)," ujarnya. (faf)